

PDM SLEMAN DESAK BUPATI SERIUS KENDALIKAN

## Banyak Peredaran dan Penjualan Miras Melanggar Aturan

**SLEMAN (KR)** - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman bersikap terhadap maraknya peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol (miras). Meski Kabupaten Sleman sudah memiliki peraturan daerah soal itu, namun kenyataannya banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh penjual/peredar miras yang telah berizin maupun tidak berizin.

"Pelanggaranannya misalnya banyak tempat peredaran atau penjualan miras yang bertempat di rumah tinggal, pemukiman masyarakat, warung, dan di dekat tempat peribadatan," kata Wakil Ketua PDM Sleman Arief Sulistiyo saat beraudiensi dengan Bupati Sleman Kustini di Kantor Bupati Sleman, Senin (15/7). Menurut Sulis, tempat peredaran atau penjualan miras yang melanggar aturan di Kabupaten Sleman tersebut telah mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat yang ber-

gerak secara mandiri dalam berbagai bentuk. Hal ini karena pihak yang berwenang terkesan melakukan pembiaran. "Sebagai bagian dari pengembangan misi untuk mewujudkan kehidupan Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara, PDM Sleman menyatakan menolak berdirinya tempat-tempat peredaran atau penjualan miras di Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandas Sulis. Selain itu, PDM Sleman

mendesak Bupati Sleman untuk serius melakukan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Sleman. Mendesak DPRD Sleman untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. "Kami (PDM Sleman) juga mendesak Polresta Sleman untuk menindak tegas terhadap peredaran dan penjualan minuman beralko-

hol yang melanggar peraturan yang berlaku," tegasnya.

Menanggapi itu, Bupati Kustini mengatakan, Pemkab Sleman telah melakukan pendataan. Data outlet miras di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 yakni outlet yang telah memiliki izin resmi sebanyak 7 outlet, outlet yang tidak memiliki izin sebanyak 35 outlet. outlet yang memiliki izin OSS melalui proses yang tidak prosedural/ilegal yaitu tanpa melalui verifikasi dari Disperindag dan persetujuan dan DPMPPTSP sebanyak 6 outlet.

"Langkah-langkah telah diambil, yaitu dari 35 outlet miras tersebut, 29 outlet miras telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 pada tanggal 10 Juli 2024. Dua toko sudah tutup (ti-



KR-Devid Permana  
**Arief Sulistiyo (kanan) menyerahkan pernyataan sikap PDM Sleman kepada Bupati Kustini.**

dak beroperasi) yaitu orangnya tidak mau keluar, yaitu Kedai Sehat 13. Dua toko belum diberikan Surat Peringatan (data baru) yaitu Vinyard dan Pasar Bibis. Satu toko

ringatan akan diberikan 2 kali dengan masing-masing waktu 7 hari, selanjutnya dilakukan penutupan sementara," ungkap Bupati. (Dev)-d

DIBERIKAN DALAM BENTUK KARTU TRANSAKSI

## Pemkab Bagikan Bansos Semangat Rp 1,8 Juta

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyalurkan bantuan sosial melalui program Sembako Sleman untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat atau Semangat. Bansos program Semangat ini diberikan kepada keluarga dengan kategori miskin atau rentan miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial dalam program apapun.

Menurut Kepala Dinsos Sleman Mustadi, jenis bantuan yang diberikan berupa kartu transaksi elektronik berisikan saldo yang dapat dibelanjakan berbagai jenis sembako di warung khusus. "Kartu elektronik akan berisi sal-



KR-Istimewa  
**Bupati Kustini secara simbolis menyerahkan bansos Semangat kepada perwakilan penerima.**

do dengan total dalam satu tahun sebesar Rp 1,8 juta yang diberikan secara bertahap setiap bulannya," jelasnya. Sementara warung tempat berbelanja sembako

dari 17 Kapanewon telah menerima bantuan program Semangat," kata Mustadi, kemarin.

Sementara Bupati Kustini mengatakan, program bansos Semangat ini merupakan komitmen Pemkab Sleman dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sosial yang harus diupayakan bersama," ujarnya.

Bupati juga berpesan kepada seluruh penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pemberian makanan bergizi bagi keluarga. (Has)-d

OPD DIMINTA TERAPKAN STANDAR KEAMANAN

## Kejahatan Siber Ancam Data Pemerintah Daerah

**SLEMAN (KR)** - Keamanan siber harus menjadi isu prioritas bagi jajaran perangkat daerah Pemkab Sleman. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pendukung kanal pelayanan publik.

Menurut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro, dalam revolusi industri 4.0 digitalisasi akses informasi terbuka selama 24 jam setiap harinya. Kejahatan siber tentunya juga mengancam data pemerintah daerah dari risiko kejahatan siber karena memanfaatkan aplikasi di berbagai gawai. "Oleh karena itu, saya ingatkan kepada setiap perangkat daerah untuk melakukan penerapan standar keamanan di masing-masing perangkat daerah. Pastikan kelayakan keamanan siber secara efektif dan efisien," katanya, Senin (15/7) terkait digelarnya saat Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City.

Dikatakan Eka, potensi risiko ini perlu diwaspadai dan dicegah meng-

ingat layanan SPBE sangat strategis. Mengingat sistem ini mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat atau negara.

Senada dengan Eka, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman Noor Hidayati Zakiah Pramulani mengatakan, melalui Forum SPBE dan Smart City ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek keamanan gawai dan data pribadi. Mengusung tema 'Keamanan Informasi di Dunia Siber', Forum SPBE dan Smart City menekankan kepada potensi risiko yang ditawarkan oleh berbagai kemudahan internet dalam menyimpan dan memberikan informasi.

"Dalam Forum SPBE dan Smart City ini akan diajarkan bagaimana cara melindungi perangkat gawai dari malware, mengenali tanda-tanda penipuan online, serta langkah-langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk mengamankan data pribadi kita," kata Ida.

Sementara narasumber dari PT Telkom WITEL Yogyakarta, Shinta Irawati mengatakan, pengguna internet di Indonesia total 66,5% dari jumlah penduduk sebanyak 276,4 juta dengan penggunaan sosial media aktif dengan total 49,9%. Hal ini mengundang berbagai pola kejahatan siber seperti pengambilan data identitas diri, penyalahgunaan data diri, hingga pemerasan.

Sedangkan Dyan Galih, Web & Mobile Security Enthusiast mengingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi. "Selalu gunakan *two-way authentication* untuk mengamankan data kita. Untuk meyakinkan diri bahwa data diri aman di internet bisa menggunakan beberapa portal terpercaya di internet. Jika ingin mengetahui data kita bocor atau tidak bisa menggunakan portal periksadata.com dengan memasukkan email yang ingin diperiksa. Dan jika sudah terjadi kebocoran data bisa lapor ke portal patrolisiber.id atau cekrekening.id." tutup Galih. (Has)-d

## Khitan untuk Hindari Risiko Penyakit

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman melalui Dinas Kesehatan melaksanakan khitan massal di Klinik Pratama Adera, Sabtu (13/7). Kegiatan itu dibuka dan ditinjau Bupati Sleman Kustini.

Menurut Bupati, khitan massal menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Sleman. Dengan menanamkan tujuan kebersihan kepada anak, diharapkan semakin banyak anak-anak yang paham akan pentingnya pelaksanaan khitan.

"Dengan khitan, Insha Allah anak akan terhindar dari berbagai risiko penyakit. Ini menjadi awal yang bagus. Insha Allah juga sekaligus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman,"



KR-Istimewa  
**Bupati Kustini memberi semangat anak-anak yang ikut khitan massal.**

katanya. Bupati juga mengimbau kepada orangtua dan pendamping, agar selalu menanamkan norma-norma kebaikan kepada anak. Sering dengan pertambahan

usia mereka, diharapkan orangtua dapat semakin bijak dalam mendidik anak-anak. Sehingga diharapkan anak-anak Kabupaten Sleman dapat terhindar dari dampak negatif pergaulan

bebas. "Saya titip agar anak-anak dididik secara tepat, sesuai dengan usia mereka dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Sebagai orangtua, mari kita dampingi agar anak-anak kita terhindar dari pergaulan yang buruk," jelas Bupati. Sementara Plt Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman Dini Melani menyebutkan khitan massal ini diikuti 100 anak dan dilaksanakan di 6 klinik binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. "Selain khitan juga dilaksanakan bakti sosial (baksos) pemasangan 60 IUD, kemudian ada baksos lansia dan disabilitas," jelasnya. (Has)-d

GELAR OPERASI PATUH PROGO 2024

## 7 Jenis Pelanggaran Jadi Fokus Penindakan

**SLEMAN (KR)** - Polda DIY menggelar operasi lalu lintas dengan sandi Operasi Patuh Progo 2024 dalam kurun waktu 14 hari. Selama operasi yang digelar mulai Senin (15/7) hingga Minggu (28/7), terdapat 7 jenis pelanggaran yang menjadi fokus operasi.

"Ada beberapa jenis pelanggaran sebagai fokus operasi, karena pelanggaran itu berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas," ungkap Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Progo 2024 di Mapolda DIY, Senin (15/7).

Ketujuh jenis pelanggaran tersebut, yakni penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara belum cukup umur dan pengendara berboncengan lebih dari satu. Kemudian pengendara motor yang tidak menggunakan helm atau pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman, pengendara yang mengonsumsi alkohol, melawan arus lalu lin-

tas dan pengemudi yang melebihi batas kecepatan. "Kepada anggota agar tidak sekadar memberikan tindakan, namun memberikan penjelasan terkait bahaya akan pelanggaran yang dilakukan," sebutnya.

Kapolda juga mengungkapkan terjadinya penurunan angka kecelakaan lalu lintas di DIY. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023, yakni penurunan sebanyak 1.009 kasus dari sebanyak 7.870 luka lintas di tahun 2023,

menurun 12,82 persen menjadi 6.861 kasus luka lintas.

"Operasi ini menitikberatkan pada kegiatan edukatif, persuasif dan humanis dengan dukungan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. Kedisiplinan berlalu lintas masih menjadi faktor kunci dalam upaya penurunan angka kecelakaan. Mari kita budayakan tertib berlalu lintas," pungkaskapolda yang didampingi Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrisal. (Ayu)-d



KR - Wahyu Priyanti  
**Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi Dirlantas Kombes Pol Alfian Nurrisal memberikan keterangan pers.**

**DPDR KABUPATEN SLEMAN**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

## Perkuat Peran Koperasi untuk Menggerakkan Ekonomi

**SLEMAN (KR)** - Jumlah koperasi di Kabupaten Sleman cukup banyak. Namun dari sekian koperasi yang ada, yang masih eksis tidak banyak. Untuk itu pemerintah daerah harus hadir guna memperkuat eksistensi koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Gerindra Dara Ayu Suharto SH mengatakan, dari ratusan koperasi yang ada, tidak semuanya aktif. Dari sebagian koperasi tersebut ada yang mati suri, bahkan ada yang tutup permanen.

"Kami cukup prihatin terhadap koperasi yang mati suri atau tutup permanen. Soalnya koperasi itu mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat," kata Dara Ayu, Senin (15/7).

Melihat pentingnya keberadaan koperasi, Dara mendorong eksekutif melalui Dinas Koperasi dan UMK untuk rutin melakukan pemetaan. Setelah itu dilakukan pendampingan dan pembinaan. "Pemerintah daerah harus punya database yang detail. Terutama koperasi yang mati suri itu

harus dibangkitkan lagi supaya kembali eksis," ujar warga Balelecur Gamping.

Menurut Dara, keberadaan koperasi cukup penting dan sangat bermanfaat bagi anggotanya. Utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Setidaknya ada tiga manfaat menjadi anggota koperasi.

"Pertama, koperasi bisa menjadi tempat untuk menyimpan uang atau menabung. Bukan tidak mungkin suku bunga di koperasi bisa lebih tinggi dibanding bank konvensional. Yang pasti biaya administrasinya lebih rendah," terang Dara.

Selain itu, lanjut Dara, setiap anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. SHU biasanya dibagikan tiap tutup buku. Lalu, yang ketiga, koperasi bisa memberikan pinjaman uang bagi anggota yang membutuhkan.

"Syaratnya biasanya lebih mudah dan sederhana ketika anggota akan membutuhkan pinjaman. Sehingga akan menguntungkan bagi anggota itu sendiri," pungkasnya. (Sni)-d



KR-Istimewa